



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKjIP)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BADUNG**

TAHUN 2020



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BADUNG
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa /Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat asung kertha wara Nugraha-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB No. 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategik yang sudah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini,kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya Pejabat dan staf yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 sampai dengan penyusunan LKjIP ini.

LKjIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan mengingat sistem Akuntabilitas ini masih relatif baru diterapkan sehingga kendala-kendala yang dihadapi terutama kesiapan masing-masing unit dalam merumuskan indikator dan dalam pengumpulan data kinerja. Namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui koordinasi dan diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi nara sumber, untuk mendapatkan jalan pemecahannya. Mudah-mudahan kondisi dalam tahun 2020 dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk peyempurnaan pada tahun-tahun berikutnya.

Kepala Dinas Koperasi,UKM, dan
Perdagangan Kabupaten Badung

I Made Widiana,S.Sos,M.Si
Pembina
NIP.19650310 198602 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum PD	2
1.3. Struktur Organisasi	6
1.4. Ruang Lingkup.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Kinerja	9
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	13
2.3. Perjanjian Kinerja	15
2.4. Cascading	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	17
B. Realisasi Anggaran	35
C. PENUTUP	36
- Lampiran - lampiran	

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Badung yang mendapat mandat dari masyarakat Kabupaten Badung untuk melaksanakan pemerintahan di Kabupaten Badung dituntut dapat menginformasikan kinerjanya secara berkala sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat masyarakat khususnya di Kabupaten Badung. Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government) yang dilandasi oleh sistem perencanaan yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan yang merupakan tuntutan masyarakat, mengharuskan Pemerintah mewujudkan Pemerintahan yang baik dengan menyelenggarakan sistem manajemen Pemerintahan yang berbasis kinerja sehingga hasil atau manfaat dari pada pembangunan merupakan pengejawantahan kebutuhan masyarakat dapat memberikan daya guna dan hasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam menggunakan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan dengan pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana melalui Visi, Misi, Sasaran dan Program unggulan yang merupakan janji pemerintah terhadap masyarakat yang dibebankan kepada dinas teknis sebagai perpanjangan tangan dan diperjanjikan atas pengelolaan anggaran yang diberikan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan tuntutan masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman sangat diperlukan pelaporan tentang pengukuran kinerja berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan yang nantinya menjadi komponen pendukung pencapaian visi, misi, sasaran dan program pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih yang dicerminkan pengelolaan anggaran yang Transparan dan Akuntabel sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga mengacu pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2016– 2021.

1.2. Gambaran Umum PD (Perangkat Daerah)

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan perubahan Perda Kabupaten Badung No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD, tanggal 21 Juli 2008 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung. Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Sasaran dan program pemerintah kabupaten Badung yang dilaksanakan melalui proses pembangunan 5 (lima) tahunan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan serta daya saing daerah.

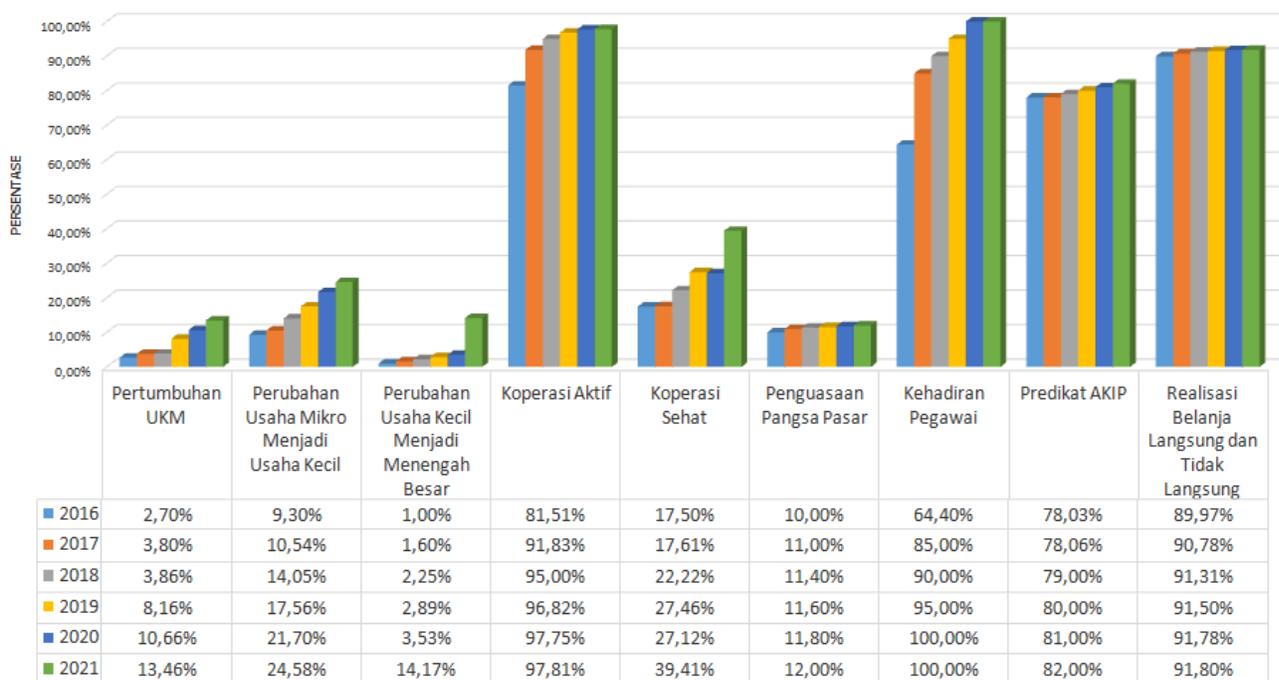
Pembangunan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung diarahkan untuk Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah menjadi pelaku Ekonomi yang Tangguh, Mandiri dan Profesional yang bertumpu pada Pemberdayaan Sumber Daya sebagai pilar Ekonomi Kerakyatan dengan mekanisme pasar sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi, Usaha Kecil Menengah dalam menunjang kelangsungan usahanya serta sektor perdagangan yang mampu berdaya saing untuk meningkatkan nilai ekspor baik berupa olahan maupun perdagangan sebagai menyangk komponen PDRB Kabupaten Badung berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha yang menjadi sumber pendapatan Daerah.

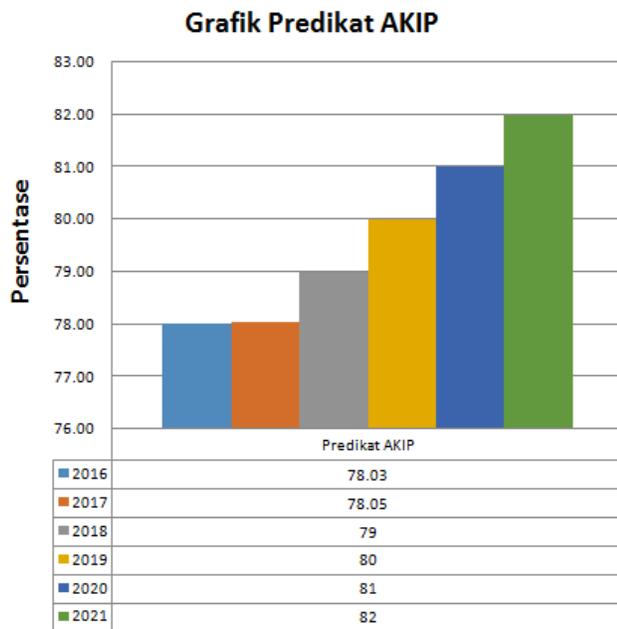
Pada akhir tahun 2020 jumlah koperasi yang aktif sebanyak 519 dari jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Badung sebanyak 583 koperasi, sedangkan jumlah UKM tahun 2020 sebanyak 22.647 UKM dengan kualifikasi Mikro sebanyak 18.643 Kecil sebanyak 3.348 dan Menengah sebanyak 656 dengan berbagai bidang usaha yang secara administrasi yang telah berijin sebanyak 70 % (15.852 UMKM). Dari sektor Koperasi, UMKM dan perdagangan Untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran RPJMD Semesta Berencana dengan indikator persentase Kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB Badung sebesar 7.71 %, (Tahun 2016), 7.73% (Tahun 2017), 7,76% (Tahun 2018), 7,80% (Tahun 2019), 7,85% (Tahun 2020) dan 7,91% (Tahun 2021) didukung 3 (tiga) tujuan dan 6 (Enam) sasaran dengan 10 (Sepuluh) indikator baik secara langsung maupun tidak langsung mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi adalah sebagai berikut.

Dari potensi yang ada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan menargetkan akhir periode 5 (lima) tahun menetapkan indikator utama dan pendukung sebagai berikut :

- 1 Pertumbuhan UKM Baru 2,7% (Tahun 2016), 3,80% (Tahun 2017), 3,86 (Tahun 2018), 8,16% (Tahun 2019), 10,66% (Tahun 2020) dan 13,46 % (Tahun 2021).
- 2 Perubahan Usaha Mikro menjadi Kecil sebesar 9,30% (Tahun 2016), 10,54% (Tahun 2017), 14,05% (Tahun 2018), 17,56 (Tahun 2019), 21,07% (Tahun 2020) dan 24,58 %, (Tahun 2021).
- 3 Perubahan Usaha Kecil menjadi Menengah sebesar 1% (Tahun 2016), 1,60% (Tahun 2017), 2,25% (Tahun 2018) , 2,89 %(Tahun 2019), 3,53% (Tahun 2020) dan 14,17% (Tahun 2021).
- 4 Koperasi Aktif sebesar 81,51% (Tahun 2016), 91,83% (Tahun 2017), 95,00% (tahun 2018) , 96,82% (tahun 2019), 97,75% (Tahun 2020) dan 97,81% (Tahun 2021).
- 5 Koperasi sehat sebesar 17,50% (Tahun 2016), 17,61% (Tahun 2017), 22,22% (Tahun 2018) ,27,46% (Tahun 2019), 33,12% (Tahun 2020), dan 39,41 % (Tahun 2021).
- 6 Penguasaan Pangsa Pasar 10% (tahun 2016), 11% (tahun 2017) 11,40% (tahun 2018) 11,60 (tahun 2019) 11,80 % (tahun 2020) dan 12% (Tahun 2021).
- 7 UTTP yang di Tera 10,20% (Tahun 2016), 12,49% (Tahun 2017), 24,98 (Tahun 2018), 37,47% (Tahun 2019), 49,96% (Tahun 2020) dan 62,45% (Tahun 2021).
- 8 Kehadiran Pegawai 64,4%.(tahun 2016), 85% (Tahun 2017) 90% (Tahun 2018),95% (tahun 2019) 100% (tahun 2020) dan 100% (Tahun 2021).
- 9 Predikat AKIP 78.03 (Tahun 2016), 78,05 (Tahun 2017) 79 (Tahun 2018) 80 (tahun 2019) 81 (Tahun 2020) dan 82 (tahun 2021).
- 10 Realisasi belanja langsung dan tidak langsung 89,97% (Tahun 2016), 90,78% (tahun 2017), 91,31% (Tahun 2018),91,50% . (tahun 2019) 91,78% (Tahun 2020), dan 91,80 (Tahun 2021)

Grafik 1.1 Target Indikator Sasaran Tahun 2016-2021





Berdasarkan atas potensi yang dimiliki serta hasil atau harapan yang diinginkan dalam 5 (lima) Tahun kedepan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dihadapkan berbagai permasalahan dan isu strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal. Permasalahan internal berkaitan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, sarana dan prasarana pendukung sedangkan permasalahan yang bersifat eksternal adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia pengelola Koperasi, UMKM, masih rendahnya jiwa kewirausahaan dan kurangnya inovasi UMKM dalam menciptakan produk-produk unggulan yang mampu bersaing dipasaran baik lokal maupun internasional. Dalam bidang Perdagangan masih kurangnya penguasaan kemajuan teknologi, rendahnya kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga memberikan pengaruh terhadap pemenuhan konsumen dan negara tujuan ekspor.

Dalam rangka memecahkan permasalahan dan isu strategis serta mendukung pencapaian target dan peningkatan hasil yang diharapkan yang dilaksanakan dalam pembangunan pembentukan perangkat daerah adalah suatu yang sangat penting sebagai perpanjangan tangan Pemerintah daerah untuk memecahkan masalah pembangunan isu-isu yang terjadi di masyarakat. Sesuai dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Mengkoordinasikan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;

2. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah - langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang – undangan;
3. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan;
4. Menyusun rencana kebijakan di Bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam rangka penetapan kebijakan Bupati;
5. Menyelenggarakan promosi produk / komoditi perdagangan;
6. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas - tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing - masing;
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
8. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang - undangan;
9. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
10. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

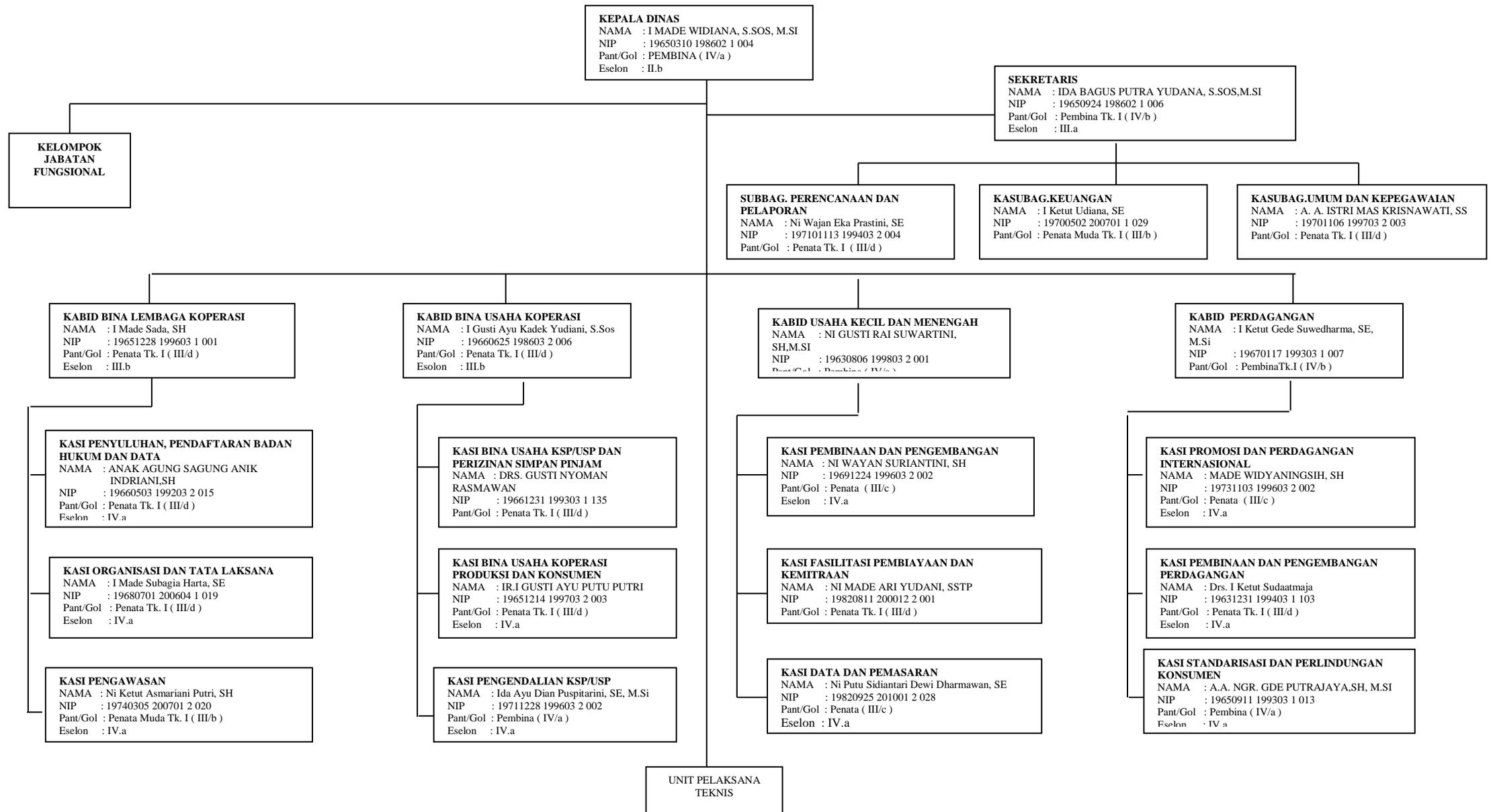
1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Badung, susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub. Bag. Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Bina Lembaga Koperasi terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Pendaftaran Badan Hukum dan Data
 - b. Seksi Organisasi dan Tata Laksana
 - c. Seksi Pengawasan
4. Bidang Bina Usaha Koperasi terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam dan Perizinan Simpan Pinjam
 - b. Seksi Bina Usaha Koperasi Produksi dan Konsumen.
 - c. Seksi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam
5. Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
 - b. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Kemitraan.
 - c. Seksi Data dan Pemasaran.
6. Bidang Perdagangan terdiri atas :
 - a. Seksi Promosi dan Perdagangan.
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan
 - c. Seksi Standarisasi dan Perlindungan Konsumern.
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan Struktur Organisasi di bawah ini :

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM,
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG
PERDA NOMOR 20 TAHUN 2016
PERBUP NOMOR 14 TAHUN 2020**



Pencapaian dan Kualitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung yang tergambar dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan kelemahan sumber daya yang bersifat internal maupun eksternal dalam bentuk peluang dan ancaman yang berpengaruh terhadap pencapaian target yang telah direncanakan atau ditetapkan. Tinjauan atau analisa kajian internal merupakan interaksi langsung aparat terhadap lingkungan kerja / Instansi, sarana dan prasarana yang tersedia, kemampuan dan jumlah aparat sebagai sumber daya manusia.

Sedangkan lingkungan eksternal yang memberikan pengaruh strategis dalam mendorong serta memacu kinerja aparat, yang digambarkan dalam menentukan tujuan, sasaran dan program yang diaplikasikan dalam kegiatan meliputi antara lain, kondisi Koperasi, usaha kecil menengah dan kondisi perdagangan, lokasi kegiatan usaha dan berbagai faktor luar yang sangat menentukan yang pada hakekatnya tidak mudah untuk dikendalikan.

Dengan demikian, maka kekuatan dan kelemahan berbagai sumber daya yang ada yang berpengaruh secara internal maupun eksternal berupa peluang dan ancaman perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan terhadap Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Jumlah pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung tahun 2020 adalah sebanyak 70 Orang yang terdiri dari PNS 69 Orang, THL 1 Orang. Dari jumlah karyawan tersebut di atas yang telah menduduki jabatan sebanyak 21 Orang, terdiri dari Eselon II ; 1 Orang, Eselon III ; 5 Orang, Eselon IV ; 15 Orang.

1.4. Ruang Lingkup

Sistematika penyajian laporan kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang gambaran umum PD dengan penekanan kepada aspek strategis, serta struktur organisasi

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas / ikhtisar Perjanjian kinerja di tahun 2020 dan Indikator Kinerja tahun 2020

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

C. PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merupakan dokumen dalam sistem perencanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyangkut 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu pelayanan wajib bukan dasar dan pilihan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran sesuai arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan yang didukung beberapa kegiatan prioritas dan kegiatan pendukung dalam rangka menjawab atau memecahkan berbagai permasalahan pembangunan dan isu-isu yang menjadi penghambat/kendala dalam pencapaian tujuan pembangunan. Untuk mendukung capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran.

Perencanaan Kinerja merupakan tahap penting dalam melaksanakan rencana strategis (RENSTRA) yang akan menuntun manajemen dan seluruh komponen organisasi yang diukur melalui capaian kinerja yang diinginkan. Untuk mengukur sejauh mana Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung telah menetapkan sasaran strategis dan masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai berdasarkan atas kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang baik secara internal maupun eksternal didukung oleh ketersediaan data yang valid. Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bersifat komperensif dan terintegrasi yang mengacu pada Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dengan ajaran Tri Sakti dan Nawa Cita yang dipakai sebagai landasan operasional dalam melaksanakan Pembangunan Daerah kabupaten Badung yang merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional dan dilaksanakan bersinergi dengan perangkat daerah yang lain baik menjadi penanggungjawab maupun mendukung perangkat daerah yang lain untuk mencapai sasaran dan tujuan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana 2016-2021.

Dalam rangka menetapkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tetap perpedoman atau mengacu pada Visi, Misi, Sasaran dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Badung serta tujuan yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem perencanaan pembangunan terintegrasi yang saling mendukung antar Perangkat Daerah melalui penyisiran program dan kegiatan yang memberikan dukungan terhadap keberhasilan tujuan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021. Adapun Visi, Misi dan Program unggulan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

VISI

Visi adalah Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Bertolak pada pengertian dimaksud maka Visi Pemerintah Kabupaten Badung adalah ***“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”***

Misi

Untuk mewujudkan Visi maka Misi yang ditetapkan adalah :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman Adat, Budaya dan Agama
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi
3. Memantapkan tata kelola pemerintah dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Governance
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia)
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Program Unggulan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian dalam arti luas untuk mencapai swasembada pangan melalui pengembangan kontemporer
2. Pembangunan infrastruktur wilayah diantaranya Jalan Lingkar Selatan dan Jalan Lingkar Barat (outer Ring Road and shortcut) di Kecamatan Kuta Selatan serta penataan utilitas umum melalui pembangunan jaringan utilitas terpadu
3. Meningkatkan distribusi pendapatan kepada masyarakat berpendapatan terendah melalui Program Perlindungan Sosial yang komprehensif di sektor dasar (pendidikan, kesehatan akses permodalan)
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan tenaga kesehatan dan sarana prasarana pelayanan kesehatan
5. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan sarana dan prasarana pendidikan
6. Mendorong dan memperkuat lembaga – lembaga pelatihan kerja untuk memperkuat jiwa wirausaha dan penyerapan tenaga kerja
7. Memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif berbasis kerakyatan
8. Mendorong penguatan peran dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan
9. Meningkatkan kualitas dan daya saing kepariwisataan serta difersifikasi destinasi/obyek obyek wisata

10. Memberdayakan banjar sebagai simpul/pusat pelestarian dan pengembangan budaya lokal masyarakat
11. Memperkuat eksistensi lembaga adat dan lembaga tradisional serta tatanan kehidupan masyarakat
12. Pelestarian sumber daya air dan hutan
13. Peningkatan program pengelolaan limbah dan sampah melalui upaya pengurangan penggunaan kembali dan daur ulang / 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)
14. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian
15. Penataan pewajahan wilayah serta memperbanyak ruang terbuka hijau
16. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menuju Smart City
17. Membentuk unit Reaksi Cepat terkait pelayanan publik untuk meningkatkan respon time dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, sasaran dan program unggulan dari pemerintah Kabupaten Badung Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung, mendukung Misi ke 4 (Empat) bertanggung jawab terhadap Misi 5 (Lima) dan mendukung misi 8 (Delapan) yaitu ***Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan, Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar Ekonomi Kerakyatan dan Memperkuat Daya Saing Daerah Melalui Mutu Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Wilayah*** serta mendukung Tujuan ke 4 (Empat), 5 (lima) dan ke 10 (sepuluh) dari 13 (tiga belas) Tujuan RPJMD Semesta Berencana) dan Sasaran 7 (Tujuh), 10 (sepuluh) dan 16 (Enam Belas) dari 20 (dua puluh) Sasaran, pendukung indikator ke 7 (Tujuh), yaitu ***Indek Pembangunan Manusia*** bertanggung jawab pada indikator 10 (Sepuluh) yaitu ***Persentase Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB*** dan pendukung indikator 17 (Tujuh Belas) yaitu ***Tingkat Pengangguran Terbuka*** dari 21 (Dua Puluh satu) indikator yang ada dalam RPJMD Semesta Berencana serta program ke 7 (Tujuh) dan 8 (Delapan) yaitu ***Memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif Berbasis Kerakyatan dan Mendorong Penguatan Peran Dunia Usaha.*** Untuk mendukung tercapainya hal tersebut di atas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Menetapkan Tujuan dan Sasaran dan program serta indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis didukung oleh kegiatan yang merupakan strategi untuk pemecahan permasalahan dan isu-isu yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung.

Keterkaitan Perangkat Daerah dalam Pencapaian Tujuan, Sasaran dan indikator RPJMD Semesta Berencana (2016-2021) digambarkan Cross Cutting seperti terlampir.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah Pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan menetapkan tujuan yang merupakan kondisi yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah hasil yang diharapkan dalam perencanaan pada tahun bersangkutan maupun 5 (lima) Tahun kedepan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung. Tabel 2.1

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten
Badung (2016-2021)

No	Tujuan	sasaran
1	Terwujudnya Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas UMKM - Meningkatnya Koperasi aktif dan sehat
2	Terwujudnya Peningkatan Perdagangan di Kabupaten Badung	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan di Kabupaten Badung
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang good government	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya disiplin pegawai - Meningkatnya implementasi Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah - Meningkatnya tata kelola keuangan yang efektif dan efisien

Dalam upaya mewujudkan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tahun 2017 - 2021 menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan
(2016-2021)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas UMKM	- Pemberdayaan dan Peningkatan Daya saing UMKM	Peningkatan kualitas SDM UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing
2	Meningkatnya Koperasi Aktif dan Sehat	- Pemberdayaan dan Peningkatan Daya saing Koperasi	Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi
3	Meningkatnya Kontribusi sektor Perdagangan di Kabupaten Badung.	- Pemberdayaan dan Penguatan sektor Perdagangan	Peningkatan UMKM yang Kreatif dan Berdaya saing
4	Meningkatnya Disiplin pegawai	- Pemberdayaan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya tata kelola Administrasi Perkantoran
5	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Pemberdayaan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya tata kelola Administrasi Perkantoran
6	Meningkatnya tata kelola Keuangan yang Efektif dan efisien	- Pemberdayaan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya tata kelola Administrasi Perkantoran

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja, sedangkan yang dimaksud dengan Utama adalah unsur yang paling prioritas, dan kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Dengan kata lain Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dan kegagalan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar dan terukur yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola organisasi agar mencapai hasil atau berkinerja sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Logika pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif & efisien.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, Program dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Dari uraian di atas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung sebagai salah satu perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Badung menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) tertuang table 2.3

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	- Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	- Meningkatnya Kualitas dan kuantitas UMKM - Meningkatnya koperasi aktif dan sehat	- Persentase Pertumbuhan UMKM Baru - Persentase usaha mikro menjadi kecil - Persentase usaha kecil menjadi Menengah - Persentase Koperasi aktif - Persentase Koperasi sehat
2	Terwujudnya Peningkatan Perdagangan di Kabupaten Badung	- Nilai ekspor UMKM Kabupaten Badung	- Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan di Kabupaten Badung	- Persentase Penguasaan Pangsa Pasar - Persentase UTTP yang di Tera

3	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah yang good government	- Persentase realisasi belanja Langsung dan Tidak Langsung	- Meningkatnya disiplin Pegawai - Meningkatnya implementasi Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah - Meningkatnya tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	- Persentase kehadiran pegawai - Predikat AKIP - Persentase realisasi belanja langsung dan Tidak Langsung
---	---	--	---	---

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada tahun 2020. Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan capaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi. Tabel 2.4

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan
Kabupaten Badung tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas UMKM	1. Persentase Pertumbuhan UKM baru	%	10,66
		2. Persentase Usaha Mikro menjadi Kecil	%	21,07
		3. Persentase Usaha Kecil menjadi Menengah	%	3,53
2	Meningkatnya Koperasi aktif dan Sehat	1. Persentase Koperasi aktif	%	97,75
		2. Persentase Koperasi sehat	%	33,12
3	Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan di Kabupaten Badung	1. Persentase Penguasaan Pangsa Pasar	%	11,80
		2. Persentase UTTP yang di Tera	%	49,96
4	Meningkatnya disiplin pegawai	1. Persentase kehadiran pegawai	%	100
5	Meningktanya inplementasi Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Predikat AKIP	%	81
6	Meningkatnya tata kelola keuangan yang efektif dan Efisien	1. Persentase realisasi belanja Langsung dan Tidak Langsung	%	91,78

2.4. Cascading

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan diperlukan adanya manajemen pengelolaan yang berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung mulai Tahun 2017 telah melaksanakan inovasi dalam hal Perjanjian Kinerja. Inovasi tersebut adalah penyusunan cascading yang memiliki makna sebuah proses dalam bentuk pohon kinerja yang berisikan tahapan- tahapan di dalam mewujudkan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Cascading ini dibuat mulai dari pimpinan sampai dengan staf sehingga memberikan kejelasan untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan dari masing-masing aparatur. (terlampir)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan tujuan, sasaran, yang didukung oleh beberapa Program dan kegiatan organisasi yang telah diukur berdasarkan indikator kinerja, yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dalam sistem pemerintahan / dunia birokrasi, akuntabilitas Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan instansi yang bersangkutan dalam mengelola anggaran.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui eksistensi, kemampuan dan tujuan pembentukan suatu Organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi, dimana hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja dalam periode yang akan datang, hal itu sejalan dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang titik beratnya pada penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja dan anggaran.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan berdasarkan Rencana Kerja Strategis 2016-2021 menetapkan kinerja melalui Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai terdiri dari 3 (tiga) tujuan, 6 (Enam) sasaran dan 10 sepuluh Indikator dengan program sebanyak 12 (Dua Belas) sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawab didukung oleh kegiatan baik yang bersifat prioritas dan pendukung pencapaian program.

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung tahun 2020 yang dilakukan dengan cara membandingkan antara kondisi pelaksanaan dengan kondisi tahun sebelumnya, dengan daerah lainnya serta kondisi akhir periode perencanaan yang ingin dicapai berdasarkan atas realisasinya, serta membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran didukung oleh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan realisasinya.

Capaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yang penilaiannya dilakukan secara mandiri oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung terhadap hasil Pengukuran Kinerja indikator tujuan, indikator sasaran dan Program.

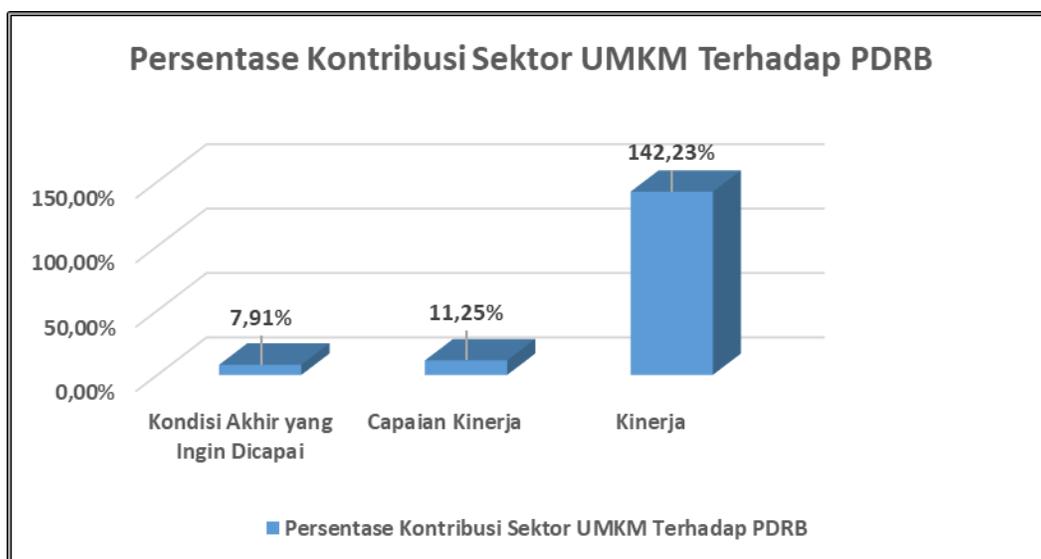
Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya dan target kinerja tahun 2020.

Hasil pengukuran indikator capaian tujuan atas indikator tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung (Tabel 3.1,3.2 dan 3.3)

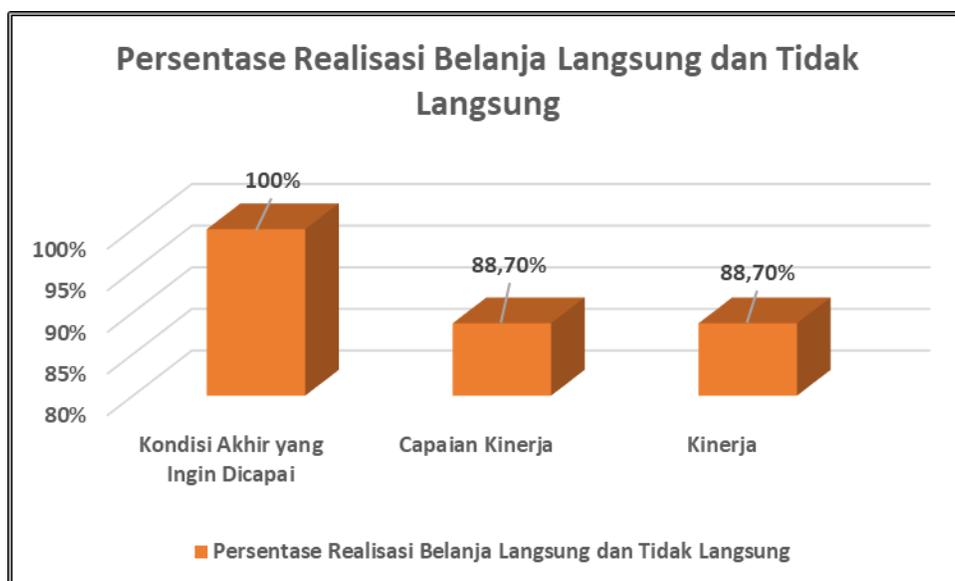
Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2020 berdasarkan Tujuan dan Indikator Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi 2019	Kondisi Akhir yang ingin dicapai	Capaian kinerja	Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	- Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	7,85%	7,91%	11,25%	142,23 %
2	Terwujudnya Peningkatan Perdagangan di Kabupaten Badung	- Nilai Ekspor UMKM Kabupaten Badung	US\$ 56.425.600,15	US\$ 57.260.445,10	US\$. 62.376.970,68	110,55 %
3	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang good goverment	- Persentase realisasi belanja langsung dan tidak langsung	100%	100%	90,30%	88,70%

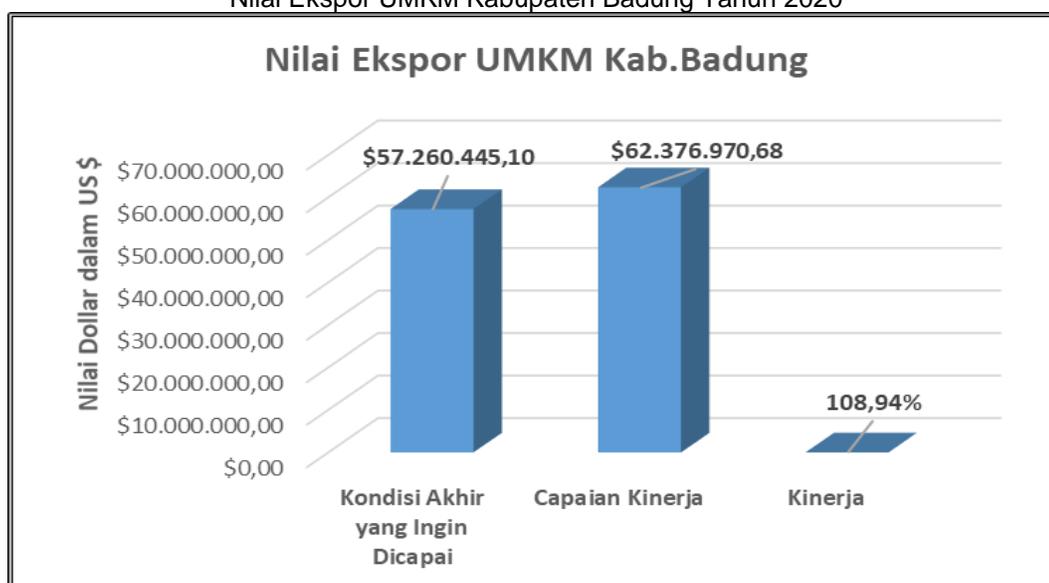
Grafik 3.1.
Persentase Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB



Grafik 3.2
 Persentase Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung



Grafik 3.3.
 Nilai Ekspor UMKM Kabupaten Badung Tahun 2020



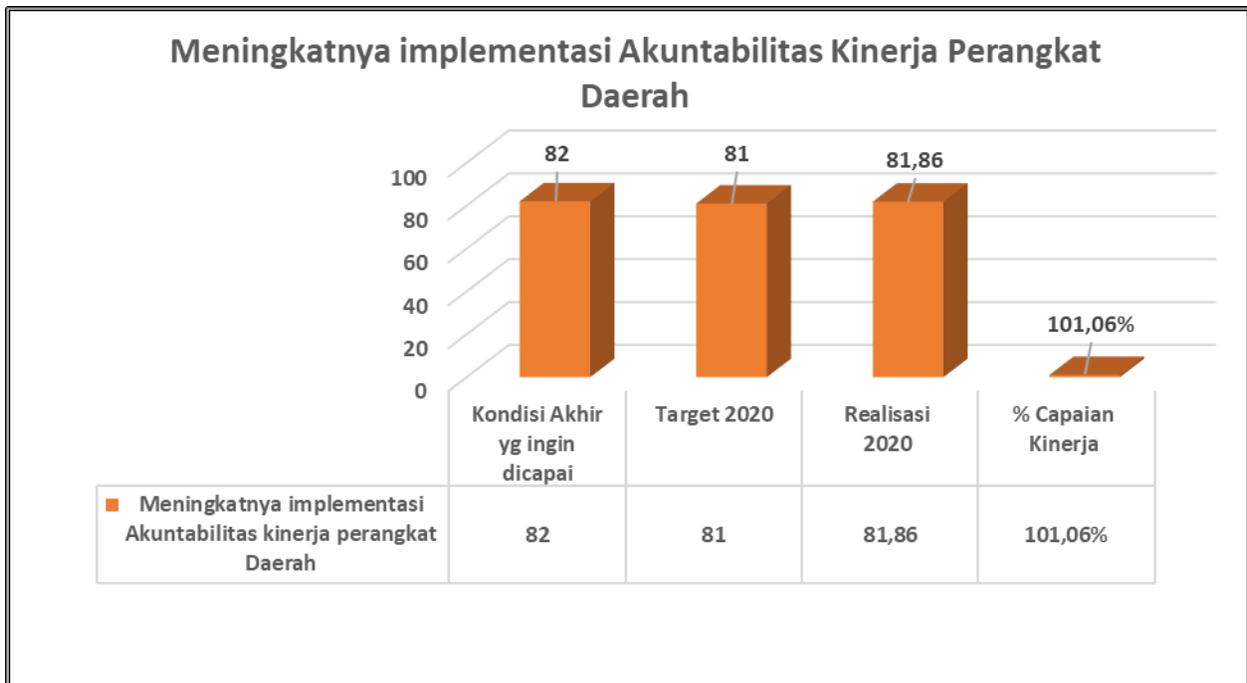
Dari tabel di atas bahwa tingkat pencapaian tujuan yang didukung atau dijabarkan melalui sasaran dan diukur oleh masing-masing indikator sasaran sebagai berikut (Tabel 3.2)

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2020
Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi 2019	Kondisi Akhir yg ingin dicapai	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas UMKM	1. Persentase Pertumbuhan UMKM baru	8,58%	13,46%	10,66%	16,6%	155,71%
		2. Persentase Usaha mikro menjadi kecil	17,62%	24,58 %	21,07%	19,99%	95,92%
		3. Persentase usaha kecil menjadi menengah	3,4%	4,17 %	3,53%	0,61%	17,28%
2	Meningkatnya Koperasi aktif dan sehat	1. Persentase Koperasi Aktif	92,23%	97,81 %	97,75%	89,02.%	91,06 %
		2. Persentase Koperasi Sehat	34,58%	39,41 %	33,12%	30,84 %	93,16 %
3	Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan di Kabupaten Badung	1. Persentase Penguasaan Pangsa Pasar	19,84%	12 %	11,80%	18,73%	158,73%
		2. Persentase UTTP yang di Tera	30,82%	62.45%	49,96%	54,53%	109,15%
4	Meningkatnya disiplin pegawai	1. Persentase kehadiran pegawai	98,50%	100 %	100%	100%	100%
5	Meningkatnya implementasi Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	1. Predikat AKIP	80	82	81	81,86	101,062%
6	Meningkatnya tata kelola keuangan yang efektif dan Efisiensi	1. Persentase realisasi belanja langsung dan tidak langsung	93,48%	91,80 %	91,78%	88,70%	96,64%

Grafik 3.4
Predikat AKIP Dinas



Realisasi indikator sasaran dibandingkan dengan target sasaran yang telah ditetapkan tidak terlepas dari Program-program yang mendukungnya. Program merupakan suatu langkah – langkah yang sangat penting dan strategis untuk mendukung pencapaian sasaran yang didalamnya terdapat berbagai kegiatan – kegiatan baik yang bersifat utama maupun pendukung yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian program yang merupakan Prestasi dari seluruh kegiatan yang ada dalam program

Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tahun 2020 ini merupakan pelaporan kinerja sampai akhir tahun 2020 yang menyajikan Indikator Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran yang didukung oleh program untuk menjadikan kondisi/hasil yang ingin dicapai dalam tahun 2020 serta memberi informasi atas keberhasilan maupun kegagalan dari pencapaian sebuah tujuan, sasaran dan program berdasarkan indikator yang dipergunakan untuk mengukurnya. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan analisis sebagai pendukung terhadap hasil pengukuran pencapaian tujuan yang dijabarkan dalam keberhasilan dari sasaran berdasarkan indikator kinerja baik utama maupun pendukung.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung bersama jajarannya telah berupaya untuk mencapai target 3 (tiga) tujuan, 6 (enam) sasaran dan 7 (Tujuh) indikator kinerja utama dan 3 (Tiga) indikator penunjang sasaran yang semuanya memberikan dukungan baik langsung maupun tidak tangsung terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran.

Adapun analisa terhadap capaian kinerja tujuan yang penjabarannya melalui alat ukur tujuan dan didukung indikator kinerja sasaran dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai wadah kegiatan di masyarakat baik sebagai produsen, konsumen maupun lembaga diharapkan mampu berperan dan menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah usaha memberikan andil besar dalam meningkatkan perekonomian rakyat dan sekaligus turut memperbaiki kondisi usaha rakyat, sementara UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan serta dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Badung yang menjadi sumber pembiayaan dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk mendukung terwujudnya Visi, Misi, Sasaran dan program pemerintah sebagai pendukung keberhasilan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Tujuan ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu : ***Prosentase Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB***. Pencapaian indikator tersebut didukung oleh 2 (Dua) Sararan yaitu Peningkatan Kuantitas dan Kualitas UMKM dan Meningkatnya Koperasi Aktif dan Sehat dengan indikator sasaran sebanyak 5 (Lima). Pengukuran terhadap pencapaian tujuan di atas diukur melalui Prosentase Pertumbuhan UKM baru, Persentase Usaha Mikro menjadi Kecil, Persentase Usaha Kecil menjadi Menengah, Persentase Koperasi Aktif dan Persentase Koperasi yang Sehat. Hasil capaian indikator pendukung tujuan adalah sebagai berikut (tabel 3.3)

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Tujuan : Terwujudnya Kontribusi Sektor UMKM
terhadap PDRB.

No	Indikator sasaran	Kondisi 2019	Kondisi Akhir yang diharapkan (Target)	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja (%)
1	3	4	5	6	7
1	Persentase Pertumbuhan UMKM baru	8,58%	13,46%	16,6%	123,33%
2	Persentase Usaha Mikro menjadi Kecil	17,62%	24,58%	19,99%	81,33%
3	Persentase Usaha Kecil menjadi menengah	3,4%	4,17%	0,61%	14,63%
4	Persentase Koperasi yang aktif	92,26%	97,81%	89,02%	91,01%
5	Persentase Koperasi yang sehat	34,58%	39,41%	30,84%	78,25%

Capaian Indikator Tujuan yaitu Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB dari kondisi tahun 2019 sebesar 7,85% dan tahun 2020 ditargetkan sebesar 7,91% terealisasi sebesar 11,25% (hasil sementara menunggu kajian BPS Maret s/d April) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja untuk tujuan 1(satu) yaitu : Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB, yang didukung oleh 2 (Dua) sasaran dan 5 (lima) indikator. Capaian kinerja Tujuan sebesar 142,23% ini berarti tujuan tersebut tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh dukungan pencapaian masing masing indikator sasaran yang didukung oleh program dan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan harapan sehingga pencapaian indikator tujuan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ini juga karena adanya penurunan sektor sektor yang terkait dengan pariwisata disebabkan lesunya pariwisata selama pandemi covid-19. Keberhasilan pencapaian indikator tujuan didukung oleh indikator sasaran antara lain:

1. Indikator Persentase Pertumbuhan UMKM baru

Indikator ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM dan Program Pengembangan system Data/Informasi dengan kegiatan sebanyak 3 (tiga) realisasi sebanyak 3 (tiga) anggaran sebesar Rp 305.426.500,- realisasi sebesar Rp. 291.959.600,- Capaian kinerja keuangan sebesar 95,59%. Terjadi efisiensi sebesar Rp 13.466.900,- (4,41%) kondisi tahun 2020 jumlah UMKM di Kabupaten Badung 20.647 UMKM, capaian kinerja indikator untuk tahun 2020 adalah sebesar 185,74%. Bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 8,58% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 39,37% sehingga mengalami peningkatan sebesar 30,79%. Kalau dibandingkan target akhir jangka menengah dalam renstra sebesar 13,46% (2021) telah terealisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 16,6%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 10,66% dengan realisasi sebesar 16,6%, realisasi sudah jauh melebihi target. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah UMKM yang signifikan dan bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 8,02%. Peningkatan pertumbuhan UMKM pada tahun 2020 karena adanya minat dan kemampuan masyarakat melihat dan memanfaatkan peluang pasar yang ada akibat lesunya sektor pariwisata yang mendorong pertumbuhan perekonomian di sektor non pariwisata.

2. Indikator Persentase Usaha Mikro menjadi Kecil

Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah). Peranan usaha mikro dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan pekerjaan sangat penting untuk mengurangi arus urbanisasi penduduk dari desa ke daerah perkotaan.

Untuk pencapaian indikator sasaran ini didukung 1 (Satu) Program yaitu Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang kondusif dengan kegiatan sebanyak 3 (tiga) realisasi sebanyak 3 (tiga) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.239.759.500,- realisasi sebesar Rp. 230.411.220,- Capaian kinerja keuangan sebesar 96,10% terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 9.348.290,- (3,90%). Persentase pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Kecil di kabupaten Badung Tahun 2019 sebanyak 17,62%, ditargetkan usaha mikro menjadi usaha kecil tahun 2020 sebesar 21,07%, realisasi sebesar 19,99 %. Realisasi tahun 2020 sudah melebihi target. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 17,62%, tahun 2020 sebesar 19,99%, mengalami kenaikan sebesar 2,37%. Bila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah dalam renstra sebesar 24,68%, telah tercapai sebesar 80,997%. Capaian kinerja indikator ini sebesar 95,92%. Realisasi tahun 2020 yang melebihi target disebabkan karena UMKM di Kabupaten Badung telah mampu menerapkan strategi dan teknologi baru dalam produksi dan pemasarannya sehingga mampu merebut pangsa pasar baru dan meningkatkan hasil penjualannya. Dengan

peningkatan kekuatan ekonomi, mampu meningkatkan skala usaha dari sebelumnya usaha mikro menjadi usaha kecil.

3. Indikator Persentase Usaha Kecil menjadi Menengah

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Untuk mendukung pencapaian Indikator sasaran ini didukung oleh Program sebanyak 1 (Satu) Program yaitu Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang kondusif dengan kegiatan sebanyak 7 (tujuh) realisasi sebesar 6 (enam) jumlah anggaran sebesar Rp.1.338.696.420,- realisasi sebesar Rp. 937.894.100,- Capaian kinerja keuangan sebesar 70,06% terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 400.802.320,- (29,94%) Realisasi persentase usaha kecil menjadi menengah tahun 2019 sebesar 3,4%., target tahun 2020 usaha kecil menjadi menengah sebesar 3,53% dengan realisasi 0,61%. Realisasi tahun 2020 tidak mampu mencapai target, capaian kinerja indikator ini sebesar 17,28%. Dibandingkan dengan target dengan jangka menengah dalam Renstra sebesar 4,17%, baru tercapai sebesar 14,63%. Pencapaian kinerja indikator ini tidak mencapai target yang diharapkan karena di level usaha menengah, agak sulit melakukan pemasaran produk karena pelemahan ekonomi baik di dalam negeri maupun luar negeri yang dipicu adanya pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia.

4. Indikator Persentase Koperasi aktif.

Koperasi adalah merupakan lembaga keuangan yang dalam pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jumlah koperasi di Kabupaten Badung tahun 2019 adalah sebanyak 567. Koperasi aktif adalah koperasi yang melaksanakan operasional untuk melayani kebutuhan anggota sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi sebanyak 499 dan tidak aktif sebanyak 68 koperasi. Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini didukung oleh 1 (Satu) Program yaitu Peningkatan Kualitas Kelembagaan jumlah kegiatan sebanyak 6 (enam) realisasi sebanyak 6 (enam) kegiatan Jumlah anggaran sebesar Rp.1.467.077.043,04 realisasi sebesar Rp. 1.157.752.050,-. Capaian kinerja keuangan sebesar 78,92% terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 309.324.993,04 (21.08%). Jumlah persentase koperasi aktif tahun 2019 sebesar 92,23%, target 2020 untuk menjadi aktif 97,75%. realisasi sebanyak 89,02%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 92,23% mengalami penurunan sebesar 3,21% dengan target jangka menengah dalam renstra sebesar 97,81% telah tercapai 91,01%. Bila dibandingkan dengan Kabupaten Tabanan tahun 2020 sebesar 71,89%, Kabupaten Gianyar sebesar 77,16%, Kabupaten Bangli sebesar 82,63% dan Kabupaten

Jembrana sebesar 74,45% (Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM Prov. Bali tahun 2020). Persentase koperasi aktif di Kabupaten Badung diatas 4 (Empat) Kabupaten, bahkan tertinggi di semua kabupaten di Bali. Capaian kinerja tahun 2020 sebesar 91,06%. Realisasi capaian kinerja dibawah target sebesar 3,21% dari target yang telah ditetapkan dipengaruhi berbagai faktor terutama faktor eksternal berkurangnya pengajuan permohonan pendirian koperasi, didukung oleh tidak adanya perubahan koperasi yang tidak aktif menjadi aktif serta adanya pencabutan badan hukum koperasi yang secara kelayakan operasional tidak memungkinkan dipertahankan sesuai amanat peraturan perundangan yang merupakan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh SATGAS yang dibentuk oleh provinsi Bali yang bertujuan untuk meningkatkan koperasi yang berkualitas bukan semata kuantitas.

5. Indikator Persentase Koperasi yang sehat

Koperasi sehat adalah koperasi yang secara pengelolaannya telah sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penilaian kesehatan koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Untuk mendukung capaian kinerja sasaran ini didukung program sebanyak 1 (Satu) Program yaitu Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi kegiatan sebanyak 3 (tiga) realisasi sebesar 3 (tiga) jumlah anggaran sebesar Rp. 228.857.220,- realisasai sebesar Rp. 217.935.850,- capaian kinerja keuangan 95,23% efisiensi sebesar Rp. 10.921.370,- (4,77%). Target Koperasi sehat tahun 2020 sebesar 39,41% realisasi sebesar 30,84% persentase kinerja sebesar 78,25% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 34,58% mengalami penurunan sebesar 3,74% terjadinya peningkatan ini diakibatkan oleh adanya situasi dan kesadaran anggota terkait dengan perkoperasian. Dibandingkan dengan target jangka menengah dalam renstra sebesar 39,41% telah tercapai sebesar 78,25%.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor : 20/Per/M/KUKM/XI/2008, tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, bahwa tujuan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi adalah memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi dan masyarakat agar koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam berdasarkan prinsip koperasi secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Jumlah koperasi sehat di Kabupaten Badung tahun 2020 (tabel 3.5)

Tabel 3.5
Jumlah koperasi sehat tahun 2020
Di Kabupaten Badung.

No	Kecamatan	Kategori Hasil Penilaian		
		Sehat	Cukup Sehat	Dalam Pengawasan
1	Petang	0	4	0
2	Abiansemal	5	15	1
3	Mengwi	10	45	2
4	Kuta Utara	6	36	0
5	Kuta	4	9	0
6	Kuta Selatan	8	23	0
	Jumlah	33	152	3

Sumber data Bidang Bina Usaha (2020)

Kabupaten Badung tahun 2020 menargetkan koperasi sehat sebesar 39,41% dengan pelaksanaan penilaian sebanyak 188 koperasi dengan hasil penilaian : kategori sehat sebanyak 33 koperasi (17,55%), kategori cukup sehat, sebanyak 152 koperasi (80,85%) dan kategori dalam pengawasan sebanyak 3 koperasi (1,596%) Peningkatan nilai kesehatan koperasi disebabkan situasi ekonomi yang mendukung, perbandingan modal sendiri, pemberian kredit kepada pihak ketiga/luar anggota lebih besar, pinjaman modal luar lebih kecil dari modal sendiri serta meningkatnya pemahaman anggota koperasi terkait dengan perkoperasian menyangkut hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab anggota. Untuk itu kedepannya akan terus diupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan pengelolaan koperasi agar terus menjadi koperasi yang sehat dengan melaksanakan pelatihan pendampingan, meningkatkan modal penyertaan dari anggota, meningkatkan pinjaman kepada anggota, meningkatkan manajemen pengelolaan koperasi, dan akan terus ditingkatkan pelaksanaan penilaian terhadap kesehatan koperasi baik dari sisi SDM maupun anggaran, serta mengoptimalkan program dan kegiatan pendukungnya.

Berdasarkan analisa tercapainya indikator Tujuan ini diakibatkan beberapa hal antara lain :

1. Pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas dengan target ini menunjukkan bahwa keinginan dan kemauan masyarakat untuk membangun usaha masih relative tinggi sesuai dengan potensi dan menjadi sentra-sentra produksi barang-barang yang dibutuhkan oleh pasar baik lokal maupun nasional didukung oleh adanya peluang atau kemudahan yang didapatkan dalam mendapatkan permodalan dalam menunjang usahanya dari lembaga keuangan berupa Koperasi yang menyediakan sumber-sumber pendanaan berupa kredit usaha bagi para UMKM yang mempunyai orientasi pengembangan usaha yang mempunyai inovasi dan kreatifitas serta jiwa interpreneursip.

2. Adanya perubahan klasifikasi UMKM yang menunjukkan bahwa kemampuan UMKM dalam menciptakan produksi yang inovatif yang berdaya saing dibutuhkan pasar serta meningkatnya jiwa kewirausahaan UMKM melihat peluang pasar baik lokal, nasional maupun internasional.
3. Meningkatnya pengetahuan UMKM khususnya berkaitan dengan penguasaan teknologi sehingga dengan mudah dapat mengakses peluang dalam pemasaran produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen.
4. Meningkatnya sistem pengelolaan usaha koperasi menjadi lebih baik dari SDM maupun manajemen tata kelola sehingga mampu menjadi lembaga yang kuat dan mandiri.

Tujuan 2 : Terwujudnya Peningkatan Perdagangan di Kabupaten Badung

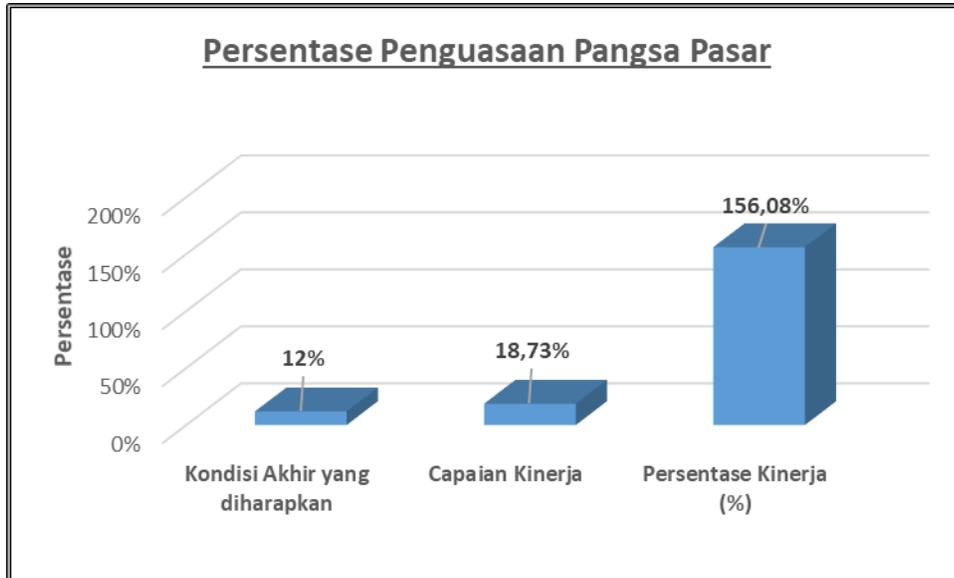
Perdagangan merupakan sektor jasa yang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pertumbuhan perekonomian serta memberikan dampak terhadap kontribusi terhadap PDRB berdasarkan lapangan usaha yang nantinya memberikan sumbangan terhadap komponen atau struktur PAD Kabupaten Badung yang dipergunakan sebagai sumber pembiayaan dalam rangka melaksanakan pembangunan sebagai tuntutan masyarakat

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Indikator Tujuan 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi 2019	Kondisi Akhir yang diharapkan (Target)	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja (%)
1	3	4	5	6	7
1.	Persentase Penguasaan Pangsa Pasar	14,25%	12%	18,73%	156,08%
2.	Persentase UTTP yang di Tera	92,25%	62,54%	54,53%	87,19%.

Grafik 3.5
Persentase Penguasaan Pangsa Pasar



Pengukuran terhadap Tujuan 2 adalah meningkatnya nilai ekspor UMKM Kabupaten Badung 2020. Kondisi 2019 sebesar US\$ 56.425.600,15 target 2020 sebesar US\$. 57.260.445,10 realisasi sebesar US\$. 62.376.970,68, capaian kinerja sebesar 110,55%. Bila dibandingkan dengan realisasi nilai ekspor Kabupaten badung tahun 2019 sebesar US\$ 91,421,980,59, untuk tahun 2020 ada penurunan nilai ekspor sebesar ada peningkatan yang cukup besar sebesar US\$ 29.045.009,91 atau sebesar 31,77 %. Adanya penurunan ini disebabkan karena lesunya perekonomian disebabkan karena pandemi covid-19.

Pencapaian tujuan ini didukung oleh 1 (satu) Sasaran dengan 2 (dua) indikator antara lain :

1. Persentase Penguasaan Pangsa Pasar

Persentase Penguasaan Pangsa Pasar dengan program sebanyak 3 (tiga) program yaitu : 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan jumlah kegiatan sebanyak 4 (empat) realisasi sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 68.697.240,- realisasi sebesar Rp. 53.593.500,- Capaian kinerja keuangan sebesar 78,01% terjadi efisiensi sebesar Rp. 15.103.740,- (21,99%), 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan didukung kegiatan sebanyak 14 (empat belas) kegiatan realisasi sebanyak 14 (empat belas) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.804.847.162,- realisasi sebesar Rp. 1.548.287.290,- Capaian kinerja keuangan sebesar 85,78% efisiensi sebesar Rp. 256.559.872,- (14,22%) dan 3 Program Pengembangan dan Peningkatan Ekspor didukung kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan realisasi 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.762.110,- realisasi sebesar Rp. 1.674.050,- capaian kinerja keuangan sebesar 95% efisiensi sebesar 88.060,- (5%).

Keberhasilan pencapaian indikator tujuan ini didukung oleh keberhasilan pencapaian sasaran dan program, Hasil analisa capaian tujuan adalah sebagai berikut :

tercapainya target ini didukung oleh kondisi ekonomi negara tujuan ekspor serta adanya kemudahan-kemudahan administrasi serta didukung oleh kemajuan teknologi canggih yang mendorong kecepatan bagi pihak produsen dan konsumen dalam melaksanakan

kerja sama sehingga mendorong tercapainya bahkan melebihi target, disamping itu didukung oleh adanya perubahan nilai kurs terhadap nilai rupiah. Target penguasaan pangsa pasar pada tahun 2019 sebesar 11,60% realisasi sebesar 19,84% melampaui target sebesar 5.34%, Target tahun 2020 sebesar 11,80% realisasi sebesar 18,73% melampaui target sebesar 6,93% Capaian kinerja sebesar 158,73%. Bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 19.84% tahun 2020 sebesar 18,73% mengalami penurunan sebesar 1,11%.Meski ada penurunan penguasaan pangsa pasar, namun produk produk Kabupaten Badung masih mampu bersaing di pasar global.

2. Persentase UTTP yang di Tera

Indikator ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Tertib Ukur dengan kegiatan sebanyak 2 (dua) realisasi sebanyak 2 (dua) anggaran sebesar Rp. 328.138.088,- realisasi sebesar Rp. 321.712.988,- Capaian kinerja keuangan sebesar 98,04%. Terjadi efisiensi sebesar Rp 6.425.100,- (1,96%). UTTP merupakan alat yang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis untuk memberikan keamanan dan kenyamanan berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap ketepatan jumlah, volume, ukuran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Target Tahun 2019 sebesar 37,47%, realisasi sebesar 30,82% capaian kinerja sebesar 82,25%. Target 2020 sebesar 49,96% realisasi sebesar 54,53% capaian kinerja sebesar 109,15%. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, mengalami kenaikan sebesar 23,71 % disebabkan karena pelaksanaan tera/tera ulang bisa meng-cover lebih banyak UTTP di Kabupaten Badung

Capaian kinerja terhadap 2 (dua) indikator ini sebesar 158,73% dan 109,15% melebihi target diakibatkan beberapa hal antara lain:

1. Pelaku usaha mulai mampu menemukan negara tujuan baru yang potensial dapat menerima produk dari Kabupaten Badung dan Bali, karena pelaku usaha telah mulai mempromosikan dan menjual produknya secara langsung ke Negara tujuan ekspor
2. Daya saing produk dan pelaku usaha di Kabupaten Badung dan Bali khususnya dalam hal peningkatan kualitas dan desain produk sudah dapat ditingkatkan
3. Persyaratan ekspor produk yang berbahan dasar dari hasil hutan mulai tahun 2012, semua produk yang berbahan dari hasil hutan wajib dilengkapi sertifikat legalitas kayu, persyaratan ini telah dapat dipenuhi oleh pelaku usaha di Kabupaten Badung.
4. Pelaku usaha di kabupaten Badung mampu menelurkan produk produk baru dengan kualitas dan harga bersaing, sehingga mampu menarik minat konsumen.

Tujuan 3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang good government.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku diperlukan adanya ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan yang berintegritas, berkarakter serta mampu melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh organisasi.

Untuk mewujudkan tujuan ini didukung oleh 3 (tiga) sasaran antara lain :

1. Meningkatnya disiplin pegawai.
2. Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah.
3. Meningkatnya tata kelola keuangan yang efektif dan efisien.

Ke 3 (tiga) sasaran didukung 3 (tiga) indikator yang merupakan alat ukur keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam mengemban tugas yang diamanatkan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati secara berjenjang. Tercapaiannya target tujuan diatas didukung oleh sasaran dengan indikator sasaran seperti tabel berikut.

Capaian Kinerja Indikator Tujuan 3
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang good government

No	Indikator sasaran	Kondisi/Target 2019	Kondisi Akhir yang diharapkan (Target)	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja (%)
1	3	4	5	6	7
1	Persentase kehadiran pegawai	103,69%	100%	100%	100%
2.	Predikat AKIP	100%	81	81,86	101,062%
3	Persentase Realisasi belanja langsung dan tidak langsung	111,28%	91,80%	88,70%	96,62%

Sasaran 1 : Meningkatnya disiplin Pegawai

Keberadaan dan disiplin pegawai dalam suatu organisasi merupakan suatu yang sangat penting dan strategis dalam menggerakkan roda organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan serta mempunyai etos kerja yang tinggi didukung oleh kedisiplinan terutama terkait dengan waktu dan kehadiran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur meningkatnya disiplin pegawai dengan indikator persentase kehadiran pegawai tahun 2019 sebesar 95% realisasi sebesar 98,50% pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. Pencapaian target ini didukung oleh 2 (dua) Program yaitu 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan sebanyak. 14 (empat belas) kegiatan realisasi sebanyak. 14 (empat belas) kegiatan jumlah anggaran sebesar Rp. 491.233.952,04 realisasi sebesar Rp.430.145.445,- capaian kinerja keuangan 87,56% terjadi efisiensi sebesar Rp. Rp.61.088.507.46 (12,44%) dan 2 Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur dengan kegiatan sebanyak 3 (tiga) kegiatan, realisasi sebanyak 3 (tiga) kegiatan jumlah anggaran sebesar Rp. 148.100.000,- realisasi sebesar Rp. 126.384.600,- capaian

kinerja sebesar 85,34% terjadi efisiensi sebesar Rp. 21.715.400,- (14,66%) capaian kinerja sasaran ini bila dibandingkan dengan tahun 2019 realisasi sebesar 92,54% target tahun 2020 sebesar 100% realisasi sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,5% dibandingkan dengan target akhir jangka menengah dalam renstra sebesar 100% telah tercapai sebesar 100%. Tercapainya indikator ini melebihi dengan target yang telah ditetapkan diakibatkan meningkatnya kedisiplinan pegawai menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku didukung oleh adanya perubahan sistem yang berkaitan dengan E kinerja serta pembinaan maupun pengawasan melekat yang dilaksanakan berjenjang yang didasari atas perjanjian kinerja yang telah disepakati yang dapat dipergunakan dalam memberikan sanksi dan penghargaan terhadap pegawai bersangkutan. Disamping itu didukung oleh diberlakukannya pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil.

Sasaran 2 : Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan yang dicapai suatu organisasi dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah yang tertuang dalam Renstra serta mendukung Visi, Misi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini dengan indikator Predikat AKIP didukung oleh program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tahun 2019 terealisasi sebesar 80 tahun 2020 ditargetkan sebesar 81 terealisasi sebesar 81 (sementara). Untuk mendukung tercapainya target didukung oleh 1 (dua) program yaitu Program peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan jumlah kegiatani sebanyak 2 (dua) kegiatan jumlah anggaran sebesar Rp. 143.636.000,- realisasi sebesar Rp. 45.081.000,- capaian kinerja keuangan 31,39% efisiensi sebesar Rp.98.555.0000,- (68,61.%) dan 2 Program Perencanaan dan Penganggaran PD dengan jumlah 1 (satu) kegiatan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.669.700,- realisasi sebesar Rp.2.051.750,- capaian kinerja keuangan 36,19%. Pencapaian indikator ini target tahun 2019 sebesar 80 realisasi sebesar 80, target tahun 2020 sebesar 81 realisasi sebesar 81,86 capaian kinerja sebesar 101, 062 % bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 80 Mengalami peningkatan sebesar 1,86 jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah dalam Renstra sebesar 82 telah tercapai 99,83%. Pencapaian kinerja tahun 2020 adalah sebesar 101,062 %. Pencapaian kinerja sesuai dengan target diakibatkan oleh pegawai dinas koperasi UKM dan perdagangan semakin menyadari dan lebih memahami isi AKIP dan peranan dokumen perencanaan dalam proses pelaksanaan kegiatan dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil yang diukur oleh indikator yang baik dan benar. Capaian kinerja pada akhir periode akan tercapai sesuai target didukung oleh peningkatan kesadaran dan pengetahuan pegawai dalam proses perencanaan berdasarkan atas data yang valid yang sangat menentukan keberhasilan sebuah perencanaan yang ditetapkan sebagai target.

Sasaran 3 : Meningkatkan tata Kelola Keuangan yang Efektif dan Efisien

Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien adalah merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan efektif dan efisien memberikan dampak terhadap penggunaan anggaran tepat guna dan hasil guna sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan roda organisasi sehingga memberikan dampak terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan dan isu strategis yang ada di masyarakat. Untuk mencapai sasaran ini dengan indikator persentase realisasi belanja langsung dan tidak langsung realisasi tahun 2019 sebesar 93,48% target tahun 2020 sebesar 91,78%. terealisasi sebesar 88,70% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar : 95,08%, Belanja Langsung (BL) : 78,77%. Capaian kinerja sebesar 96,64%. Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program Perencanaan dan Penganggaran PD (Perangkat Daerah) Kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.669.700,- realisasi sebesar Rp. 2.051.750,- capaian kinerja keuangan sebesar 36,19%. terjadi efisiensi sebesar Rp. 3.617.960,- (63,81). Capaian kinerja bila dibandingkan dengan tahun 2019 realisasi sebesar 102,16%. Mengalami penurunan sebesar 13,46% dan jika dibandingkan dengan target Akhir jangka menengah dalam renstra sebesar 91,80 % telah mencapai target sebesar 96,62%. Kinerja ini didukung pelaksanaan dan administrasi pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur dan tata kelola yang baik dan benar serta didukung efisiensi anggaran dari proses penawaran serta harga dilapangan lebih rendah dari pagu. serta adanya perubahan kondisi kepegawaian akibat adanya peraturan baru yang berdampak pada jumlah pegawai yang mempengaruhi realisasi anggaran utamanya pada Belanja Tidak Langsung.

Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan berdasarkan atas tujuan dan sasaran tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Capaian kinerja atas dasar tujuan:

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan didalam Renstra menetapkan 3 Tujuan yaitu :

1. Terwujudnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB didukung oleh 2 sasaran, target tahun 2020 7,85% realisasi sebesar 11,25% (sementara) capaian kinerja sebesar 142,23%.
2. Terwujudnya Peningkatan Perdagangan di Kabupaten Badung didukung oleh 1 sasaran diukur dengan indikator Nilai Ekpor UMKM Kabupaten Badung target tahun 2020 US\$. 56.425.600,15 realisasi sebesar US\$. 62.376.970,68 Capaian kinerja sebesar 110.547%.
3. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang good government didukung oleh 3 sasaran target 100% realisasi sebesar 88,7% Capaian Kinerja sebesar 96,64%.

b. Capaian kinerja atas dasar sasaran.

Dinas Koperasi UKM dan perdagangan didalam Renstra menetapkan 6 (enam) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas UMKM didukung oleh 3 indikator rata-rata capaian kinerja sebesar 91,65%.

2. Meningkatnya Koperasi Aktif dan Sehat didukung oleh 2 indikator rata-rata capaian kinerja sebesar 92,11%.
3. Meningkatnya Kontribusi sektor Perdagangan di Kabupaten Badung didukung 2 indikator capaian kinerja sebesar 133,94%.
4. Meningkatnya disiplin pegawai didukung oleh 1 indikator capaian kinerja sebesar 100%
5. Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh 1 indikator capaian kinerja sebesar 101,062 %
6. Meningkatnya tata kelola keuangan yang efektif dan efisien didukung 1 indikator capaian kinerja sebesar 96,64 %

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dalam mencapai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. Anggaran yang berbasis kinerja merupakan suatu yang sangat penting dilaksanakan sebagai upaya optimalisasi penggunaannya berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan yaitu efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel. Dalam menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan tetap mengacu pada Money Follow Program sehingga anggaran yang diberikan tepat guna dan sasaran untuk memecahkan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh lembaga dan instansi sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah baik daerah maupun pusat. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tahun anggaran 2019 diberikan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator melalui beberapa program yang dijabarkan kedalam beberapa kegiatan baik yang bersifat utama maupun penunjang dalam pelaksanaan urusan wajib bukan dasar dan pilihan.

Sumber dana untuk pembiayaan semua kegiatan tersebut diatas adalah dari APBD Kabupaten Badung tahun 2020 sebesar Rp. 16.804.085.680,08,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 10.232.184.735,- dan belanja langsung sebesar Rp.6.571.900.945,08 Belanja langsung terdiri dari : Belanja Barang dan Jasa Rp.6.571.900.945,08,- Dari anggaran diatas, realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.728.442.483,- (95,08%) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.10.232.184.735,- Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.571.900.945,08 realisasi sebesar Rp. 5.176.463.543,- (78,77%) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp. 6.571.900.945,08 Realisasi sebesar Rp. 5.176.463.543,- (78,77%) Dari Total Anggaran sebesar Rp. 16.804.085.680,08. Realisasi sebesar Rp. 14.904.906.026,- dengan persentase realisasinya sebesar 88,70%. Dalam rangka pengelolaan keuangan pada dinas koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2019 terbagi atas belanja tidak langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) terjadi efisiensi atau pengembalian anggaran sebesar Rp. 2.176,940.532,08 atau 12,95% (Tabel Realisasi Anggaran Terlampir).

Terjadinya efisiensi dalam penggunaan anggaran diakibatkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Adanya beberapa sub. Kegiatan dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan diakibatkan oleh adanya perubahan aturan dan regulasi.
2. Adanya efisiensi belanja barang dan jasa akibat penawaran dalam proses pengadaan serta harga barang yang dibutuhkan dibawah dari pagu yang dianggarkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. Pada belanja tidak langsung terjadi pengembalian ke kas daerah terkait dengan dana cadangan akibat perubahan kebutuhan kepegawaian.

C. PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang di percayakan kepada setiap instansi pemerintah, guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

LKjIP Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang : Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil evaluasi dan analisa capaian kinerja Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Analisa Capaian Kinerja Tujuan

Pada tahun 2020 capaian kinerja dari tujuan 1 (satu) dengan indikator meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB capaian kinerjanya sebesar 142,23%. Tujuan 2 (dua) dengan indikator Nilai ekspor UMKM Kabupaten Badung capaian kinerjanya 110,55% dan Tujuan 3 (tiga) dengan 1 (satu) indikator Persentase realisasi belanja langsung dan tidak langsung capaian kinerja 88,70%. Jadi rata-rata capaian kinerja dari ke 3 (tiga) adalah 113,83%

Analisa Capaian Kinerja Sasaran

Dari 6 sasaran rata-rata capaian masing-masing sasaran adalah sbb: Sasaran 1 dengan 3 indikator rata-rata capaian kinerjanya sebesar 89,64%. Sasaran 2 dengan 2 indikator rata-rata capaian kinerjanya 92,11%. Sasaran 3 didukung oleh 2 indikator capaian kinerjanya sebesar 133,94%. Sasaran 4 didukung oleh 1 indikator capaian kinerjanya sebesar 100%. Sasaran 5 dengan 1 indikator capaian kinerjanya 101,062%. Sasaran 6 dengan 1 indikator capaian kinerjanya 96,64%

Dari 10 indikator diatas rata-rata capaian kinerjanya sebesar 101,87%, Pencapaian kinerja tujuan dan sasaran tak lepas dari upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsi serta tujuan dibentuknya organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2020. Namun tidak dipungkiri bahwa masih ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam berkinerja, baik kinerja pelaksanaan kegiatan maupun pencapaian tujuan dan sasaran. Pemasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sehingga Capaian Kinerja pendukung tujuan dan sasaran diukur berdasarkan indikator kinerja ada yang tidak sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan baik yang bersifat internal maupun eksternal dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kurangnya partisipasi anggota masyarakat, kurangnya kemampuan SDM, pengurus, pengawas, dalam pengelolaan Koperasi yang sehat
2. Terbatasnya kemampuan UMKM dalam mengakses Teknologi dalam pengembangan usahanya.
3. Rendahnya kesadaran pelaku UMKM untuk mengikuti hal-hal yang bersifat kewirausahaan, pemberdayaan, pengembangan serta keikutsertaannya dalam ajang pameran dan promosi.
4. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan UMKM untuk memanfaatkan peluang pasar serta kurangnya kreatifitas dan inovasi untuk menciptakan produk.
5. Kurangnya kesadaran para pedagang/pemilik UTTP untuk melaksanakan tera ulang

Solusi Permasalahan :

1. Melaksanakan penyuluhan, peningkatan pengetahuan dalam perkoperasian yang mengacu pada azas-azas dan prinsip-prinsip pengelolaan koperasi yang sehat dan mandiri
2. Meningkatkan kemampuan UKM dalam mengakses teknologi melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat pemberdayaan, pengembangan dan Ilmu teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat dan memberikan bantuan peralatan untuk usaha UKM.
3. Meningkatkan jaringan pemasaran melalui kegiatan temu usaha dan konsultasi antar UKM, dan memfasilitasi pelaksanaan pameran/promosi usaha baik lokal, nasional bahkan internasional.
4. Menyiapkan Klinik UMKM sebagai tempat untuk mendapatkan informasi dan pendampingan dalam mengembangkan UMKM untuk menciptakan produk yang berkualitas.
5. Memberikan perlindungan kepada konsumen dengan pelayanan tera ulang terjadwal dan bersifat insidental melalui pelayanan tera keliling

LAMPIRAN

TABEL REALISASI TAHUN 2020

NO.	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	2	3	4	5	5	7
1	Persentase Pertumbuhan UKM baru	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	1 Wokrshop Wirausaha Pemula dan berkembang 2 Pelatihan dan Training Kewirausahaan	305.426.500,00 2.156.900,00 301.417.400,00	291.959.600,00 1.807.800,00 288.533.700,00	13.466.900,00 349.100,00 12.883.700,00
		Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi	1 Penyusunan Profil Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	1.852.200,00	1.618.100,00	234.100,00
2	Persentase Usaha Mikro menjadi Kecil	Program Penciptaan Iklim Usaha - usaha Kecil Menengah yang kondusif	1 Pembinaan dan Pengembangan Produksi Usaha Kecil dan Menengah (One Village One Product / OVOP) 2 Pembinaan Kelompok UMKM 3 Klinik Usaha kecil menengah (UMKM)	239.759.510,00 4.980.910,00 3.364.700,00 231.413.900,00	230.411.220,00 2.009.800,00 2.935.920,00 225.465.500,00	9.348.290,00 2.971.110,00 428.780,00 5.948.400,00
3	Persentase Usaha Kecil menjadi Menengah		1 Publikasi UMKM di Kabupaten Badung dalam Era New Normal 2 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kecamatan Petang Kab.Badung 3 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kec. Abiansemal Kab.Badung 4 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kec. Mengwi Kab.Badung 5 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kec. Kuta Utara Kab.Badung 6 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kec. Kuta Kab.Badung 7 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kec. Kuta Selatan Kab.Badung	1.338.696.420,00 194.240.708,00 109.925.952,00 206.905.952,00 206.905.952,00 206.905.952,00 206.905.952,00 206.905.952,00	937.894.100,00 - 90.969.850,00 165.414.850,00 161.064.850,00 168.264.850,00 178.814.850,00 173.364.850,00	400.802.320,00 194.240.708,00 18.956.102,00 41.491.102,00 45.841.102,00 38.641.102,00 28.091.102,00 33.541.102,00

NO.	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	2	3	4	5	5	7
			1 Kajian Pasar Hgienis di Kabupaten Badung	1.186.800,00	1.089.050,00	97.750,00
			2 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Geger Kabupaten Badung	110.661.752,00	102.482.710,00	8.179.042,00
			3 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Peninsula Kabupaten Badung	65.249.332,00	59.196.450,00	6.052.882,00
			4 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Melasti Kabupaten Badung	44.435.432,00	38.755.620,00	5.679.812,00
			5 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Jembatan Tukad Bangkung, Air Terjun Nung Nung, Kawasan Pura Sada Kapal	57.934.932,00	46.849.770,00	11.085.162,00
			6 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pengelola Pasar di Kec. Petang, Abiansemal dan Mengwi Kabupaten Badung	228.263.186,00	207.716.350,00	20.546.836,00
			7 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pengelola Pasar di Kec. Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan Kabupaten Badung	248.715.976,00	229.808.690,00	18.907.286,00
			8 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Pandawa Kabupaten Badung	174.276.428,00	148.269.480,00	26.006.948,00
			9 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Uluwatu Kabupaten Badung	77.767.452,00	67.258.350,00	10.509.102,00
			10 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Legian Kabupaten Badung	243.363.080,00	197.045.030,00	46.318.050,00
			11 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Kuta Kabupaten Badung	228.167.380,00	175.590.890,00	52.576.490,00
			12 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Sangeh dan Taman Ayun Kabupaten Badung	158.956.628,00	123.956.550,00	35.000.078,00

NO.	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	2	3	4	5	5	7
			13 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Nusa Dua Kabupaten Badung	110.661.752,00	102.482.710,00	8.179.042,00
			14 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Padang-Padang Kabupaten Badung	55.207.032,00	47.785.640,00	7.421.392,00
		Program Pengembangan dan Peningkatan Ekspor		1.702.110,00	1.614.050,00	88.060,00
			1 Pembuatan buku profil Pelaku dan Produk ekspor Kabupaten Badung	1.702.110,00	1.614.050,00	88.060,00
2	Persentase UTTP yang di Tera	Program Peningkatan Tertib Ukur		328.138.088,00	321.712.988,00	6.425.100,00
			1 Verifikasi Alat Ukur Standar Kab. Badung	71.058.188,00	68.966.388,00	2.091.800,00
			2 Pelaksanaan Sidang Tera/Tera Ulang	257.079.900,00	252.746.600,00	4.333.300,00
7	Pesentase Kehadiran pegawai	Program Pelayanan Administasi Perkantoran		491.233.952,04	430.145.445,00	61.088.507,04
			1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	26.055.000,00	11.343.898,00	14.711.102,00
			2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas/operasional	20.500.000,00	14.744.380,00	5.755.620,00
			3 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	3.390.000,00	3.373.000,00	17.000,00
			4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.970.500,00	20.956.550,00	1.013.950,00
			5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.648.800,04	29.705.500,00	1.943.300,04
			6 Penyediaan Komponen Instansi Listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00	1.990.450,00	9.550,00
			7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.487.900,00	2.199.500,00	288.400,00
			8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.480.000,00	72.480.000,00	-
			9 Penyediaan Makanan dan Minuman	3.265.500,00	3.265.500,00	-
			10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	26.655.720,00	26.655.720,00	-
			12 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	129.153.000,00	109.654.400,00	19.498.600,00
			13 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	60.280.000,00	52.180.000,00	8.100.000,00
			14 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	91.347.532,00	81.596.547,00	9.750.985,00

NO.	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	2	3	4	5	5	7
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		148.100.000,00	126.384.600,00	21.715.400,00
			1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	91.000.000,00	71.405.500,00	19.594.500,00
			2 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	23.000.000,00	21.150.000,00	1.850.000,00
			5 Pemeliharaan Peralatan Kantor	34.100.000,00	33.829.100,00	270.900,00
8	Predikat AKIP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		143.636.000,00	45.081.000,00	98.555.000,00
			1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	137.940.000,00	39.880.000,00	98.060.000,00
			2 Penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	5.696.000,00	5.201.000,00	495.000,00
9	Persentase realisasi belanja Langsung dan tidak langsung	Program Perencanaan dan Penggaran PD		5.669.700,00	2.051.750,00	3.617.950,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (RENJA, RKA)	5.669.700,00	2.051.750,00	3.617.950,00

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kabupaten Badung

I Made Widiana,S.Sos,M.Si

Pembina

NIP. 19650310 198602 1 004